



Sempat Ditarik, Dana Hibah Rp 8 Miliar BNPB

Amlapura (Bali Post) –

Gara-gara sibuk hajatan pilbup tahun 2015, anggaran hibah Rp 8 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat, tak terserap atau gagal dilaksanakan. Anggaran itu sempat ditarik BNPB pusat dan setelah itu Karangasem pun terancam tak mendapat bantuan lagi. Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri mengakui hal itu saat menerima Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Ir. Harmensyah, dan Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Tetty Saragih di kantor bupati, Selasa (4/10) kemarin.

Harmensyah mengatakan, dalam beberapa kali rapat koordinasi di BNPB sempat diputuskan bantuan hibah untuk Karangasem Rp 8 miliar. Bantuan itu memang sempat ditarik. Alasannya, karena pelaksanaannya lambat dan diperkirakan dana itu sudah tak bisa digulirkan pada tahun anggaran 2015. Saat itu, kata Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karangasem Ida Ketut Arimbawa, anggaran itu sempat hendak dipakai Rp 2 miliar untuk penanggulangan banjir Tukad Bambang. Sedangkan, sisanya Rp 6 miliar untuk peningkatan ruas jalan Bunutan-Cekik. Tetapi, lantaran sibuk hajatan pilbup dan tim anggaran belum paham bagaimana sistem penganggaran dan pertanggungjawabannya, maka dana itu urung dipergunakan.

Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri, kata Hermensyah, lantas datang ke BNPB. Anggaran Rp 8 miliar itu pun diminta kembali, karena kabupaten di ujung Timur Pulau Bali itu, benar-benar sangat memerlukan dana hibah tersebut. Tetty Saragih, menambahkan memang ada keragu-raguan pihak Pemkab dalam menggunakan dana hibah itu. Sebenarnya, penggunaan dana itu tak ada batas waktunya. Namun, paling lambat setahun setelah dana itu ditransfer ke Kasda, pekerjaan harus dilaksanakan dan tak boleh ada sisa lebih tahun anggaran (silpa) di APBD. "Anggaran itu juga tak usah masuk APBD Kabupaten dan disetujui dewan. Soalnya, untuk dana hibah itu sudah ada payung hukum khusus di pusat. Malah dana itu sudah ada persetujuan DPRRI," kata Tetty. (013)



Nihil, Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kebencanaan

Bangli (Bali Post) -

Sejak awal tahun, sejumlah bencana telah terjadi di Kabupaten Bangli. Kerusakan tak hanya pada fasilitas pemerintah tetapi juga milik masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah. Di balik kondisi itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangli belum bisa memberikan bantuan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Penyebabnya karena regulasi yang mengatur hal itu belum ada.

Sekretaris BPBD Bangli I Wayan Teja menjelaskan, sejak Januari hingga September telah terjadi 40 bencana. Beberapa di antaranya berupa kebakaran, pohon tumbang hingga puting beliung. Bencana itu juga ada yang menelan korban jiwa. Berdasarkan hasil pendataannya, kerugian yang ditimbulkan telah mendekati angka Rp 2 miliar. Sejatinya, guna meringankan beban sejumlah korban, pihaknya berkeinginan memberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Akan tetapi, belum bisa terwujud lantaran regulasi yang berkaitan dengan itu belum ada. "Regulasi khusus bantuan rehab dan rekonstruksi belum ada. Jadinya kami tidak bisa menganggarkannya," terangnya didampingi Kasi Kedaruratan dan Logistik I Ketut Agus Sutapa dan Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dedy Upariawan, Selasa (4/10) kemarin.

Pembentukan regulasi tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja. Itu harus didukung dengan fasilitas salah satunya gudang penyimpanan barang bantuan. Hal ini yang masih menjadi kendala utama yang dihadapi pihaknya. "Kami belum punya gudang. Kalau regulasinya tidak ada, nanti barang bantuannya, salah satunya genteng ditaruh di mana? Kalau dititipkan di toko bangunan, nanti dibilang penimbunan," katanya.

Pejabat asal Dusun Manuk, Desa Susut ini menyebutkan supaya tetap mendapatkan bantuan, permohonan korban terpaksa dialihkan ke bansos yang tidak direncanakan. Itu telah diatur dengan Permendagri 39 tahun 2012 tentang alokasi Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan. Bantuan ini ada di pemkab dan juga Pemprov Bali. Khusus dari Pemprov, sesuai SK Gubernur, besar bantuan untuk fasilitas milik pribadi Rp 5 juta sampai Rp 10 juta dan fasilitas umum Rp 10 juta sampai Rp 50 juta. Berdasarkan data, usulan permohonan bantuan baru ada dari empat bencana yakni kebakaran di Banjar Bias Desa Abang Songan, Banjar Beluhu Desa Abang Batudinding, Banjar Binyan Desa Buahan dan Puting Beliung yang merusak Pura Puseh Desa Pakraman Adat Selat, Susut. "Itu kerusakannya cukup parah," tegasnya. (kmb45)



RUSAK - Bangunan Pura Puseh Desa Pakraman Adat Selat yang rusak diterjang angin puting beliung beberapa waktu lalu. Pemberian bantuan oleh pemerintah hanya mengandalkan bansos yang tak direncanakan.



Sewa 56 Mobdin untuk Dua Bulan

Pemkab Anggarkan Rp 700 Juta

Bangli (Bali Post) -

Pemkab Bangli di anggaran perubahan mulai menggunakan jasa sewa mobil untuk mendukung operasional pejabat eselon II dan III. Jumlah mobil yang akan disewa sebanyak 56 unit. Untuk keperluan sewa mobil dinas (mobdin) selama dua bulan ke depan, Pemkab Bangli telah menganggarkan Rp 700 juta.

Kepala Bagian Umum, Per-

lengkapan dan Aset Daerah Bangli, I Made Mahindra Putra, Selasa (4/10) kemarin mengatakan, mobil yang bakal disewa dengan sistem e-katalog tersebut berjenis Innova dan Avanza. Sesuai rencana, mobil berjenis Innova diperuntukkan bagi pejabat eselon II. Sementara Avanza untuk pejabat eselon III.

Dipaparkan Mahindra Putra, dari total anggaran sewa mobil

Rp 700 juta, senilai Rp 500 juta di antaranya digunakan untuk biaya sewa kendaraan untuk pejabat eksekutif. Sedangkan sisanya Rp 200 juta untuk pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Bangli. "Kita sewa mobil tersebut untuk dua bulan yakni November dan Desember," terangnya.

Dengan menggunakan sistem sewa pihaknya mengklaim bisa

melakukan penghematan anggaran yang cukup besar. Sebab dengan menyewa kendaraan, Pemkab tidak perlu lagi menganggarkan biaya pemeliharaan dalam APBD Bangli. Jika sewaktu-waktu mobil sewaan tersebut rusak, maka Pemkab Bangli tidak perlu memperbaikinya melainkan tinggal memberitahukan kepada pihak ketiga untuk diganti dengan mobil lainnya.

"Kita tinggal pakai saja. Kalau rusak kita tinggal telepon pihak ketiga untuk diganti," jelasnya.

Sebelumnya, dalam APBD induk 2016 Pemkab Bangli sempat berencana melakukan pengadaan mobdin dengan sistem pembelian. Namun, sesuai hasil kajian dan instruksi bupati, rencana pembelian mobil dinas tersebut dibatalkan karena alasan penghematan. (kmb40)